

KALEIDOSKOP

20

22


**BADAN
KEPEGAWAIAN
NEGARA**



PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIIL NEGARA (ASN) TAHUN 2022

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024, Pemerintah telah menetapkan Program Prioritas Nasional yang mewajibkan Instansi untuk dapat mengimplementasikan Manajemen Talenta dan meningkatkan Sistem Merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN.

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional tersebut, BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN pada bulan Oktober s/d November selenggarakan Pemetaan Kompetensi bagi 20.075 ASN dari 38 Instansi Pusat.



SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN)



Aplikasi berbasis mobile untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung dengan database PNS Nasional

Dilatarbelakangi dengan kondisi data ASN yang belum terintegrasi karena dikelola dan dikembangkan oleh masing-masing Instansi, BKN terus melakukan penataan data dan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan satu data ASN sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan melakukan berbagai perbaikan proses bisnis, termasuk pemutakhiran data mandiri oleh setiap ASN melalui MySAPK.

Progress pemanfaatan SIASN oleh instansi sebanyak 626 Instansi, dengan perincian 363 menggunakan Simpegnas dan 263 yang menggunakan webservice.

SATU DATA ASN MELALUI SIASN

Tujuannya agar pengelolaan data kepegawaian di masing-masing instansi yang mencakup Data perencanaan pegawai; Pengadaan pegawai; Pengembangan pegawai; Data Kenaikan Pangkat/Pensiun, mutasi, status dan kedudukan, pemberhentian pegawai, sampai dengan peremajaan data pegawai terhubung langsung dengan database nasional yang dikelola BKN melalui SIASN.





- Progress PDM (Kewenangan BKN)
Realisasi : 99,18% sisa: 0,82%
- Progress PDM (Kewenangan Instansi)
Realisasi : 97,17% sisa: 2,83%



PERCEPATAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI (PDM)

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi ASN Secara Elektronik Tahun 2021, BKN melakukan pemutakhiran data sebagai landasan Satu Data ASN. Update Data per 17 Desember 2022 terkait PDM yang telah selesai adalah sekitar 97.17%

Dengan adanya data PDM yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan di banyak aspek, termasuk manajemen ASN. Data yang ada pada Satu Data ASN nantinya akan dimanfaatkan untuk peningkatan layanan manajemen kepegawaian ASN, implementasi sistem merit dan manajemen talenta, penyusunan rekomendasi kebijakan dan perencanaan strategis, mendorong terciptanya *open government data*, hingga pemetaan ASN serta profil ASN.

*Mungkin
gak sih?*


"PENYEDERHANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN"

- KENAIKAN PANGKAT,
- MUTASI, DAN
- PENSIUN

PEMANGKASAN LAYANAN MUTASI

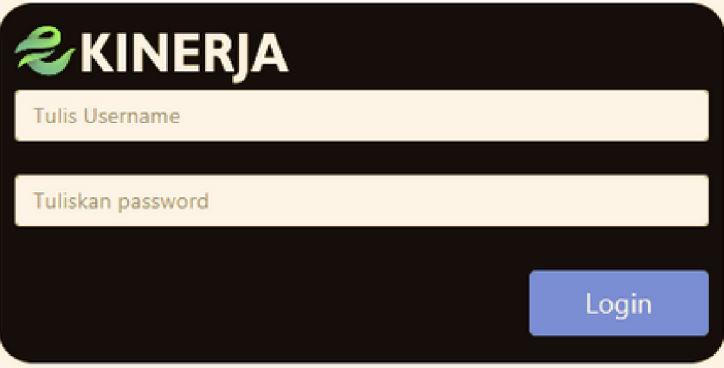
Percepatan layanan kepegawaian menjadi salah satu prioritas BKN pada tahun 2022. Tujuannya untuk melakukan pemangkasan layanan kepegawaian, baik dari aspek proses bisnis layanan maupun aspek infrastruktur sistem yang digunakan.

Beberapa di antaranya seperti Layanan Pensiun yang sebelumnya membutuhkan 5 (lima) hari kerja menjadi 1 (satu) hari kerja; Layanan Perbaikan dan Penetapan NIP 2 hari kerja; dan Layanan Kenaikan Pangkat serta Pindah Instansi yang dipangkas menjadi 2 hari kerja.



Uji Coba Prototipe SI Kinerja 2022 (berdasarkan [PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2022](#))

- Username menggunakan NIP
- Password menggunakan kata terakhir nama ditambah "_kinerja"
Contoh : SETIAWAN_kinerja



SISTEM KINERJA ASN TERINTEGRASI

Adanya peralihan kebijakan manajemen kinerja ASN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, BKN melalui Direktorat Kinerja ASN mulai menyiapkan pengintegrasian sistem penilaian kinerja Instansi Pemerintah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau Simpegnas yang dikelola BKN untuk menerapkan sistem manajemen kinerja nasional.

Tujuannya agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki data yang akurat terkait kinerja PNS di instansinya sehingga penyelewengan terhadap sistem merit dapat dihindari, misalnya saja intervensi pimpinan saat pengisian jabatan muncul karena belum ada data yang akurat terkait kinerja. Terdapat 39 instansi yang sudah menjadi pilot project dari pengintegrasian tersebut.



Deputi Bidang Wasdal Otok Kuswandar



“Wasdal tidak hanya urusan menemukan pelanggaran, tapi juga menyiapkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan melalui rekomendasi.”

INDEKS NSPK

Dalam hal Pengawasan dan Pengendalian terkait implementasi NSPK Manajemen ASN, BKN telah melakukan penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN terhadap 72 Instansi Pusat dan 542 Instansi Daerah, dimana terdapat 66 Instansi yang memperoleh kategori A.

Ada 18 (delapan belas) elemen yang dinilai, meliputi: Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN; Pengadaan ASN; Pengangkatan ASN; Pangkat; Jabatan; Pola Karier; Pengembangan Karir ASN; Mutasi; Penilaian Kinerja; Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas; Penghargaan; Disiplin; Cuti; Kode Etik; Pemberhentian; Jaminan Pensiun dan Hari Tua; Pensiun dan Perlindungan.

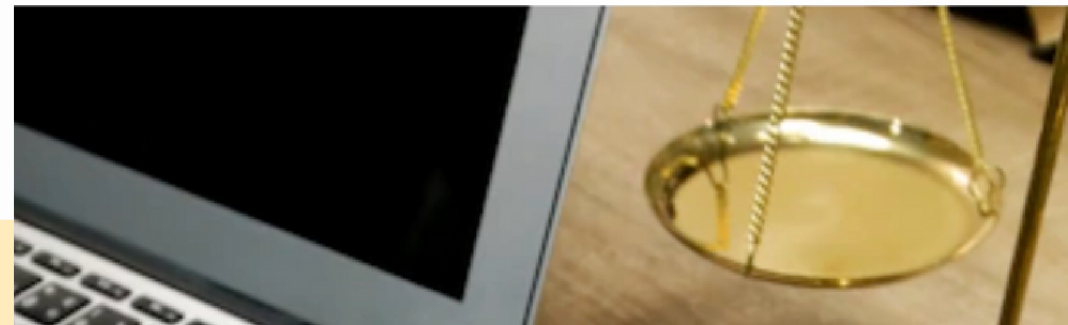
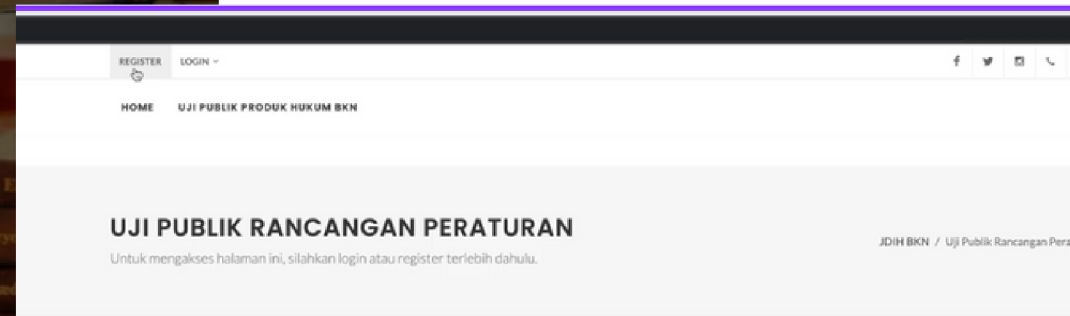
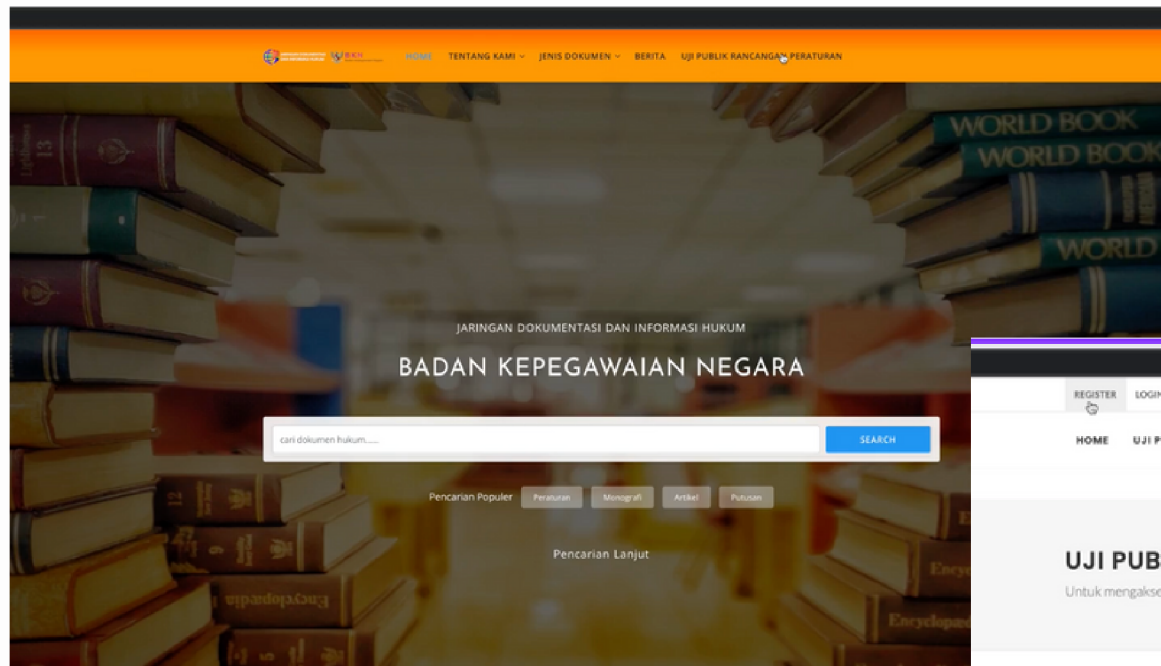
BKN telah menerbitkan 2 Peraturan, di antaranya melalui :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN ; dan
2. PerBKN 12/2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN



PENERAPAN INTEGRITAS MORALITAS

Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian selama tahun 2022 telah melakukan kolaborasi dengan BNPT, BNN, KPK dan BIN dalam hal penyusunan database Integritas Moralitas, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan Pengawasan dan Pengendalian atas penerapan integritas dan moralitas di seluruh K/L/D, sebagai poin penting dalam pengembangan karier PNS.



PERATURAN BKN

Dilatarbelakangi oleh instruksi Pemerintah agar setiap instansi pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi yang jumlahnya semakin banyak, Direktorat Peraturan Perundang-undangan BKN menghadirkan aplikasi e-Uji Publik yang dapat diakses melalui JDIH BKN dan telah terintegrasi dengan JDIH Nasional. Tujuannya untuk menjangkau partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen kepegawaian.

Adapun Peraturan BKN yang ditetapkan sepanjang tahun 2022 sebanyak 17 Peraturan di bidang manajemen kepegawaian.

Pada tahun 2022, BKN juga menyederhanakan 81 Peraturan BKN dengan omnibuslaw berupa Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022.

Tabel 1
Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Nasional Tahun 2020
(Pengukuran Mandiri)

NO	INSTANSI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	JUMLAH INSTANSI YANG MENGUKUR METODE MANDIRI	DIMENSI				NILAI	KATEGORI
				KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Instansi Pusat	146.697	18	14,69	31,35	25,93	4,96	76,03	Sedang
	a. Kementerian	106.529	9	14,14	29,87	26,03	4,94	74,98	Sedang
	b. Lembaga	40.168	9	15,24	32,83	25,82	4,97	77,09	Sedang
2	Instansi Daerah	814.355	121	12,78	23,71	24,67	4,96	65,74	Rendah
	a. Provinsi	182.412	9	13,97	26,11	24,30	4,94	69,31	Rendah
	b. Kabupaten/Kota	631.943	112	12,69	23,52	24,70	4,96	65,45	Rendah
	Jumlah/Nilai IP ASN Nasional	961.052	139	13,03	24,70	24,83	4,96	67,07	Rendah

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

BKN mulai merealisasikan adanya IP ASN yang diawali dengan terbitnya Peraturan BKN 8/2019 sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan instansi masing-masing.



Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun dan digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Profesionalitas ASN secara nasional.



PETUNJUK PENGISIAN RENCANA PENGEMBANGAN KARIER PNS INSTANSI

Jabatan Saat Ini	Penempatan Jabatan Berdasarkan Rekomendasi Pengembangan	Nama SKPD (Instansi)/Unit Kerja/Bagian (Bidang) Rekomendasi Penempatan	Lowongan Kebutuhan Jabatan	Penempatan Sesuai Rencana Karir	JPT	JA	Keterampilan	Keahlian	Bentuk Pengembangan Karir	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke)	Prosedur Pengisian dan Mekanisme Pengisian
Ka. Bag. Laporan Keuangan	Kepala Biro Umum	BKN, Biro Umum	1	Pratama					Diagonal	1	Sekresi Tertutup
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	BKN, Biro Perencanaan & Organisasi	1	Pelaksana					Horizontal	2	Sekresi Tertutup

PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KARIER INSTANSI PEMERINTAH

Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan bagian manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Tujuannya untuk memberikan kejelasan dan kepastian karier ASN sehingga tercipta kesesuaian antara pengembangan karier dengan kebutuhan instansi sekaligus untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya.

Di sepanjang tahun 2022, BKN melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan karier di 137 instansi pemerintah di tingkat instansi dan tingkat nasional yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi ASN atau SIASN.



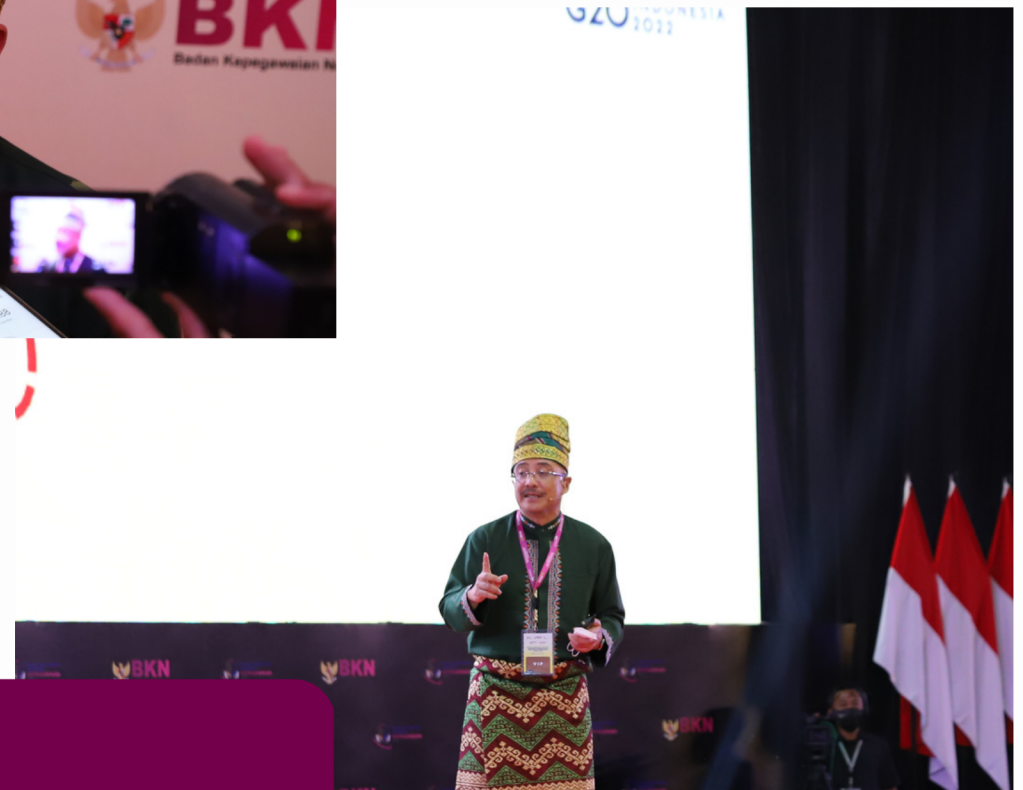
SELEKSI CASN TAHUN 2022 OLEH BKN

Tahun 2022 BKN fasilitasi seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dimulai pada Oktober 2022, BKN membuka portal pendaftaran bagi seleksi PPPK Tenaga Guru. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan pada November 2022 dan seleksi PPPK Tenaga Teknis pada Desember 2022 yang berlangsung hingga Tahun 2023.

Sejumlah 204.146 Peserta Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti Tes Seleksi Kompetensi menggunakan metode CAT di 128 Titik lokasi.



Narasumber: KemenPANRB, Bank BCA, Grab Indonesia, ESQ Leadership Center dan PT Pegadaian Persero



RAKORNAS KEPEGAWAIAN 2022

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen ASN terutama adaptasi kerja birokrasi terhadap perubahan masa pandemi Covid-19, BKN mengajak seluruh Pengelola Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah menerapkan *Digital Governance* secara masif sebagai basis pelayanan birokrasi.

Hal ini pula yang melatarbelakangi BKN untuk melaksanakan evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia pada tahun 2022 melalui Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Kepegawaian bertajuk “Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan” yang digelar pada Kamis, 21 Juli 2022 secara hybrid dan diikuti oleh 19.558 peserta.



3 KATEGORI AWARD:

- Kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik.
- Kategori elemen implementasi manajemen ASN
- Kategori pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian



BKN AWARD 2022

BKN yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional kembali memberikan penghargaan bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah melalui BKN Award 2022.

Penghargaan diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungannya masing-masing, mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.



ANUGERAH KIP

BKN meraih peringkat Badan Publik “Informatif” dengan nilai 90,93. Aspek utama yang dinilai pada anugerah tersebut adalah Inovasi BKN dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dan Strategi BKN dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik secara berkelanjutan. Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat kepada 372 Badan Publik, baik Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, Partai Politik dan Perguruan Tinggi.



PRIA AWARD

Badan Kepegawaian Negara (BKN) meraih Penghargaan untuk Sub Kategori Krisis dan Pasca Krisis *Bronze Winner* dalam ajang PR Indonesia Awards (PRIA) Tahun 2022. PRIA Awards merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi dan komprehensif dalam dunia PR di Indonesia. Ajang penghargaan PR Indonesia Tahun 2022 ini diikuti lebih dari 700 peserta di antaranya para profesional PR dan para Pegiat Humas dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah, BUMN dan perusahaan swasta, dengan jumlah peserta sebanyak 789 yang mencakup 9 kategori.



WTP MINIMAL 13 KALI

Badan Kepegawaian Negara kembali raih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke -13. Predikat tersebut diperoleh secara berturut-turut sejak tahun 2009. Opini WTP menunjukkan bahwa kementerian/lembaga telah terbukti mampu menjalankan sistem akuntansi pemerintah yang berkualitas, berstandar internasional dan memenuhi kaidah good governance.



IKPA AWARD

Badan Kepegawaian Negara (BKN) berhasil meraih peringkat 1 pada kategori penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pelaksanaan anggaran terbaik dengan jumlah satuan kerja (satker) sebanyak 12, dan dengan nilai 92.72. Prestasi tersebut diraih dalam ajang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Award Tahun Anggaran 2021. Indikator penilaian prestasi tersebut terdiri dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.



PENGHARGAAN PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

BKN berhasil meraih penghargaan terbaik sebagai pengelola pengaduan pelayanan publik kategori Aspek Keberlanjutan, Konektivitas, dan Dampak Terbaik dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 Tahun 2022.

BKN juga masuk dalam 30 peserta terbaik kategori instansi pemerintah umum sehingga berhak atas penghargaan dari Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo dan termasuk 1 dari 17 peserta yang berhak mendapatkan Piala Anggakara Birawa.



ANUGERAH PELAYANAN PUBLIK

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kantor Regional (Kanreg) X BKN Denpasar mendapatkan penghargaan pada ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” KL umum.

Anugerah ini merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Prima dan Pemerintahan Berkelas Dunia.



ANUGERAH MERITOKRASI

Badan Kepegawaian Negara (BKN) meraih kategori Sangat Baik pada Anugerah Meritokrasi Penyerahan Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit Bagi Instansi Pemerintah dengan nilai 339 yang diselenggarakan oleh KASN